

Nomor : 227/PM.00.01/K.SN/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 terkait penentuan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang mengurus pindah memilih pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, 23 September 2023

Yth.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Jl. A. P. Pettarani Nomor 102, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 terkait penentuan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang mengurus pindah memilih pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 97 huruf (a) dan (b) angka (2), yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 100 huruf (e), yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

b) Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- c) Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT.
 - (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan terhadap:
 - a) pembentukan Pantarlih;
 - b) Coklit;
 - c) penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
 - d) penyusunan DPK atau DPKLN;
 - e) penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan
 - f) penggunaan sistem informasi data Pemilih.

2. Peraturan mengenai hak memilih:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 198, yang berbunyi:

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199, yang berbunyi:

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- b) Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang berbunyi:

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, yang berbunyi:

Dalam Pokok Permohonan:

2. Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".
3. Menyatakan frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".
3. Peraturan mengenai jadwal tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi:

Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai sejak Kamis, 22 Juni 2023 sampai dengan Kamis, 8 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb):

a) Pasal 210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- 1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- 3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- 4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (30), yang berbunyi:

30. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Pasal 116, yang berbunyi:

- 1) DPT dapat dilengkapi dengan DPTb.
- 2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.
- 3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;

- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
- a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 117, yang berbunyi:

- 1) Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dengan cara:
 - a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan
 - b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

Pasal 118, yang berbunyi:

- 1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1):
 - a. meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan
 - b. melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.
- 2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- 3) *Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:*
 - a. *identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;*
 - b. *alamat dan TPS tujuan; dan*
 - c. *jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.*
- 4) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

Pasal 119, yang berbunyi:

- 1) *PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.*
 - 2) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan.*
 - 3) *KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal.*
 - 4) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
 - 5) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
4. **Peraturan mengenai Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain:**
- a) **Pasal 348 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:**
 - 1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
 - a. *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;*
 - c. *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan*
 - d. *penduduk yang telah memiliki hak pilih.*
 - 2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.*
 - 3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.*
 - 4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
- 5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.
 - 6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
 - 7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - 8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
 - 9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- b) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagai berikut:

Angka 1 halaman 1, yang berbunyi:

1. Pemilih yang telah mengurus pindah domisili dan dibuktikan dengan KTP-el terbaru sesuai domisili saat ini, maka pemilih tersebut dapat mengurus pindah memilih dengan cara melapor ke KPU Kabupaten/Kota;

Angka 3 halaman 3, yang berbunyi:

3. Pemilih yang telah terdaftar di TPS lokasi khusus dan ingin mengurus pindah memilih ke TPS regular, KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/>;
 - b. petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
 - c. petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan/atau Kartu Keluarga terbaru;
 - d. petugas membandingkan isian Formulir Model A Surat Pindah Memilih antara isian alamat KTP-el, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan alamat pindah memilih yang berisi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;

- e. petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan pada Tabel 1. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara.

Angka 4 halaman 3, yang berbunyi:

4. Pemilih yang telah terdaftar di TPS lokasi khusus dan ingin mengurus pindah memilih di TPS lokasi khusus lainnya, KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. petugas menerima usulan perpindahan pemilih dari TPS lokasi khusus ke TPS lokasi khusus lainnya;
 - b. petugas melakukan pengecekan dokumen pendukung pemilih yang akan melakukan pindah memilih dari TPS lokasi khusus ke TPS lokasi khusus lainnya berupa KTP-el;
 - c. petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdpdtonline.kpu.go.id/>;
 - d. petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
 - e. petugas membandingkan isian Formulir Model A Surat Pindah Memilih antara isian alamat KTP-el, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan alamat pindah memilih yang berisi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - f. petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan pada Tabel 1. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara.

Angka 5 halaman 3, yang berbunyi:

5. Pemilih yang telah terdaftar DPT Luar Negeri dengan paspor dan ingin mengurus pindah memilih ke Dalam Negeri dengan menunjukkan KTP-el yang dimilikinya, maka 4 pemilih tersebut dapat mengurus pindah memilih dengan cara melapor ke KPU Kabupaten/Kota;

Angka 6, halaman 4, yang berbunyi:

6. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti permohonan pindah memilih dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan/atau Kartu Keluarga terbaru atau paspor;
 - b. petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
 - c. petugas membandingkan isian Formulir Model A Surat Pindah Memilih antara isian alamat KTP-el, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan alamat pindah memilih yang berisi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - d. petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan pada Tabel 1. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara.

Huruf e pada angka 2, halaman 1 dan 2, yang berbunyi:

- e. petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan pada tabel di bawah.

Tabel 1. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara

No	Kondisi pindah memilih sesuai alamat KTP-el	Surat Suara				
		PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD KabKo
1	Berbeda kabupaten/kota dan provinsi	✓	X	X	X	X
2	Berbeda kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi	✓	Lihat angka 3	✓	Lihat angka 4	X
3	Berbeda kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat	✓	✓	✓	Lihat angka 4	X
4	Berbeda kecamatan atau kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	✓	✓	✓	✓	Lihat angka 5
5	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota	✓	✓	✓	✓	Lihat angka 6
6	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓

7. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 488, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489, yang berbunyi:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 510, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 544, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) pada pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada persiapan dan pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 2. Melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan tepat waktu dan/atau sesuai dengan jadwal yang telah diatur.
 3. Melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
 4. Melakukan koordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 5. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan Pemangku Kepentingan terkait pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 6. Memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang mengurus pindah memilih berdasarkan.
 7. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
 8. Menyosialisasikan kepada Masyarakat untuk terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara dan/atau melalui <https://cekdpdonline.kpu.go.id/>.
 9. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada Masyarakat, Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan Pemangku Kepentingan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar

- Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan
- b. Menerima konsultasi terkait pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Arsip.